

PENUNTASAN WAJAR DIKDas DAN KETERSEDIAAN BAHAN BELAJAR DI PESANTREN SALAFIYAH

M. Murtadho

Abstract

Assuming that there are 5.5 million of kids become uneducated people because they did not get even a standart basic education (wajar dikdas). Seeking for a solution for this kind of problem, the goverment then, obligate all of the citizen among age 7 – 15 to participate in the basic education for at least 9 year. That goverment policy socialized through INPRES No. 1/1995. In practicing this INPRES, Islamic Salafiyah Boarding School (pesantren salafiyah) have had a huge contribution to decrease growth of uneducated people \pm 7.6 %, it means 417.845 kids became educated people. Unfortunately Pesantren Salafiyah only have 30 % books such for exsample which are not reliable enough for generally overcome the problems in education sphere. They totally depend on their teacher's charity and their compassion that make all of education programs at Pesantren Salafiyah play on.

Lahir di Yogyakarta, 1972. Aktivitas yang digeluti adalah sebagai peneliti di Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Aktif dalam kegiatan-kegiatan lintas agama di wilayah Jakarta dan turut berpartisipasi di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jakarta. Saat ini sedang menempuh Program Doktor (S3) Antropologi Universitas Indonesia (UI) Jakarta.

Key words : *Human Development Index (HDI), wajar dikdas, bahan ajar (books), pesantren salafiyah, precentation*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peringkat *Human Development Index* (HDI) Indonesia pada tahun 2006 berada pada posisi ke 108 dari 177 negara.¹ Dari peringkat ini, Indonesia masih termasuk kategori negara berkembang. Jauh tertinggal dengan negara tetangga Malaysia yang telah mencapai posisi ke 61. Salah satu indikator pengukuran untuk menentukan tingkat HDI adalah tingkat kemampuan baca tulis atau melek huruf masyarakat (*literacy*). Program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (Wajar Dikdas) yang digalakkan Pemerintah saat ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan tersebut.

Malik Fajar mencatat, tantangan pendidikan di Indonesia meliputi tingginya buta aksara usia 10 tahun ke atas mencapai 16 juta

jiwa, anak usia 7 – 15 tahun yang tidak menikmati pendidikan dasar tercatat 5,5 juta anak, pengangguran usia produktif tercatat 3,9 juta orang, anak usia dini yang tidak terlayani satuan pendidikan pra sekolah tercatat 10,1 (82,6 %), dan penduduk miskin ± 37,5 juta jiwa.²

Wajar Dikdas merupakan realisasi dari amanat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi : “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Amanat ini kemudian diperjelas lagi operasionalnya dalam UU Sisdiknas No 2 tahun 2003 dan No. 20 tahun 2003, demikian juga termuat dalam GBHN 1993, GBHN 1998 dan RPJMN tahun 2005. Secara nasional, gerakan ini diawali dengan lahirnya Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1994 tentang program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar Dikdas 9 Tahun). Dengan Inpres ini setiap warga negara yang berusia pendidikan dasar antara 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar 9 tahun.

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia_Indonesia (dikutip 16/7/2007)

² Malik Fajar. 2005. *Holistika Pemikiran Pendidikan*. (Ed). Ahmad Barizi. Jakarta: PT RajaGrafindo, hh. 253-254.

Implementasi Wajar Dikdas ini dilaksanakan oleh Depdiknas dan Departemen Agama. Depdiknas menyelenggarakan SD, SMP, SMP Terbuka, Kejar Paket A dan Kejar Paket B sedangkan Departemen Agama melaksanakan MI, MTS, MTS Terbuka, Wajar Dikdas di pesantren salafiyah. Program MTs Terbuka (MTsT) di Departemen Agama dimulai pada tahun 1995/1996 pada 5 MTsT, tahun 1996/1997 bertambah 26 MTsT, dan pada tahun 1997/1998 bertambah 29 MTsT. Total seluruhnya 60 MTsT. Sedangkan penuntasan Wajar Dikdas di pesantren salafiyah dimulai pada tahun 2000. Program MTs Terbuka kian meredup, berkurang bahkan tutup pada tahun 2000 seiring dengan dibukanya program penuntasan Wajar Dikdas di Pesantren Salafiyah.

Penelitian yang dilakukan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan tahun 2005 ini mencoba mengkaji program penuntasan Wajar Dikdas pada pesantren salafiyah. Berdasarkan data Departemen Agama RI tahun 2006, pesantren

salafiyah menyerap anak usia Wajar Dikdas sebanyak 417.845 anak, melibatkan 3.902 pesantren salafiyah se Indonesia.³ Ini berarti pesantren salafiyah mampu berpartisipasi dalam penuntasan Wajar Dikdas ini sebanyak 7,6 % dari dari 5,5 juta anak usia 7-15 tahun yang tidak menikmati pendidikan dasar.

Penelitian diarahkan pada permasalahan terkait dengan pelaksanaan Wajar Dikdas di pesantren salafiyah dan pemenuhan kebutuhan bahan belajar untuk mereka para peserta Wajar Dikdas di pesantren salafiyah.

Rumusan Permasalahan

Pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelenggaraan dan pengelolaan Wajar Dikdas 9 tahun di pesantren salafiyah?
2. Bagaimana penyediaan dan distribusi bahan belajar Wajar Dikdas di pesantren salafiyah?
3. Bagaimana kecukupan dan pemanfaatan bahan belajar Wajar Dikdas 9 tahun di pesantren salafiyah?

³ Departemen Agama RI. 2006. *Statistik Pendidikan Agama dan Keagamaan Tahun Ajaran 2005-2006*. Jakarta: Ditjen Pendidikan Islam, h. 139.

4. Apa kendala dan solusi pelaksanaan Wajar Dikdas di lapangan?

Kerangka Konseptual

Menurut HAR Tilaar, pendidikan dasar menjadi sesuatu yang penting karena beberapa alasan berikut : 1) pendidikan dasar menjadi hak asasi manusia Indonesia, sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak boleh terhalang oleh perundangan yang ada di bawahnya; 2) masalah manajemen pendidikan dasar bukanlah hanya masalah yuridis, tetapi lebih dari itu karena berkenaan dengan anak Indonesia yang justru perlu memperoleh pendidikan yang mendasar bagi kelangsungan hidup bernegara. Bukankah salah satu tujuan hidup bernegara kita ialah untuk memperoleh kehidupan rakyatnya; 3) adanya sentralisasi dan desentralisasi pendidikan hendaknya perlu didudukkan untuk mencapai keberhasilan proses pendidikan itu

sendiri.⁴ Karena itu pendidikan dasar harus dilaksanakan sedemikian rupa oleh negara dalam memenuhi kewajibannya terhadap warga negara.

Dalam pelaksanaannya, menghadapi tuntutan zaman modern, menurut Mastuhu (2003), idealnya materi ajar dalam pendidikan dasar memenuhi sifat-sifat berikut : utuh (*integrallity*), satu kesatuan (*bolistic*), menyeluruh (*keholistic*), berkesinambungan (*continuity*), ajeg (*consistency*), serta dapat memenuhi kebutuhan peserta didik, pasar dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).⁵ Poin materi ajar hendaknya dapat memenuhi kebutuhan peserta didik merupakan poin yang menjadi perhatian dalam penelitian ini, yakni materi ajar untuk peserta Wajar Dikdas di pesantren salafiyah.

Materi ajar berupa buku pelajaran mempunyai fungsi, menurut Nasution (1999), sebagai berikut: 1) membantu guru melaksanakan kurikulum karena telah disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku; 2) merupakan pegangan dalam

⁴ HAR Tilaar. 2004. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Rosdakarya, h. 22.

⁵ Mastuhu. 2003. *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*. Yogyakarta: Safiria Insani Press, h. 38.

menentukan metode pengajaran; 3) memberi kesempatan siswa untuk mengulangi pelajaran atau mempelajari pelajaran baru; 4) dapat digunakan untuk tahun-tahun berikutnya dan bila direvisi dapat bertahan dalam waktu yang lama; 5) keseragaman buku pelajaran dapat memberi kesamaan mengenai bahan dan standar pengajaran; 6) memberikan kontinuitas pelajaran di kelas yang berurutan, sekalipun guru berganti; 7) memberi pengetahuan dan metode mengajar yang lebih mantab bila guru menggunakannya dari tahun ke tahun.⁶

Penelitian ini, selanjutnya akan meneliti pelaksanaan wajar dikdas dan ketersediaan bahan ajar di pesantren salafiyah. Aspek pelaksanaan Wajar Dikdas di pesantren salafiyah dikaji dari sisi penyelenggaraan, siswa, guru, pembiayaan dan sarana prasarana. Sedang aspek ketersediaan bahan ajar meliputi materi tatap muka dan materi belajar mandiri. Materi tatap muka meliputi pelajaran matematika, Bahasa Indonesia dan IPA; sedang

materi belajar sendiri untuk tingkat Ula terdiri dari IPS dan PPKN, sedang untuk Wustho terdiri dari IPS, PPKN, Ekonomi, Sejarah, Geografi, Fisika, Biologi dan Bahasa Inggris.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif sederhana. Sampel ditentukan secara aksidental,⁷ di mana setiap daerah penelitian diambil satu kasus pesantren salafiyah.

Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengisian instrumen, wawancara, survai ke lapangan dan telaah dokumen.

Teknik Analisa.

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif statistik. Sesuai dengan tujuan, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab: a) jumlah ketersediaan bahan ajar pada masing-masing pesantren salafiyah pelaksana Wajar Dikdas; b) mendeskripsikan pola penyelenggaraan Wajar Dikdas

⁶ Nasution. 1999. *Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, h. 103.

⁷ Manase Malo. 2002. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Universitas Terbuka, h. 15.

di pesantren salafiyah; c) memetakan keterpenuhan bahan ajar untuk lingkup nasional.

Penelitian ini mengambil lokasi di enam propinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan. Keenam propinsi ini dianggap representatif karena bisa disebut 'gemuk' dengan lembaga pesantren.

Penentuan pesantren diserahkan kepada masing-masing peneliti dengan menyesuaikan dengan tingkat kemungkinan penelitian dilakukan. Berdasarkan pilihan peneliti, pesantren yang dijadikan obyek penelitian ini adalah PPS Az Zuhroh, Langkat Sumut, PPS Al Husna, Kota Palembang Sumsel, PPS Bustanul Mutaalimin, Semarang Jateng, PPS Pandanaran, Sleman DIY, PPS Al Fitrah, Surabaya Jatim, dan PPS Al Mursyidul Amin, Banjar Kalsel. Jenjang Wajar Dikdas yang menjadi sasaran penelitian ini adalah tingkat Wustho.

TEMUAN PENELITIAN

Pesantren Salafiyah dan Penyelenggaraan Wajar Dikdas

Perbandingan PPS yang menyelenggarakan Program Wajar Dikdas dari total PPS setiap propinsi.

Dari 6 propinsi sasaran penelitian, perbandingan antara banyaknya jumlah pesantren salafiyah untuk satu propinsi dengan PPS yang menyelenggarakan program Wajar Dikdas mempunyai persentase yang bervariasi. Di Sumatera Utara pesantren salafiyah seluruhnya berjumlah 35 buah, sedangkan yang melaksanakan program Wajar Dikdas sebanyak 25 buah (71,42 %). Di Palembang pesantren salafiyah yang menyelenggarakan program Wajar Dikdas 40,95 %, di Jawa Tengah 10,45 %, di Yogyakarta 7,43 %, di Jawa Timur 40,58 %, di Kalimantan Selatan 37,17 %.

Dari daerah sasaran penelitian, persentase terbesar ditemukan di Sumut yaitu 71,42 %, sedang persentase terkecil terdapat di Yogyakarta yaitu 7,43 %. Hal ini dapat mengingat di Sumut model pesantren salafiyah jumlahnya sangat sedikit yaitu 35 buah dan itu hampir semua berpartisipasi menyelenggarakan program penuntasan Wajar Dikdas. Berbeda dengan di Yogyakarta, meskipun jumlah pesantren salaf jumlahnya banyak yaitu 202 buah, tetapi yang berpartisipasi menyelenggarakan program Wajar Dikdas hanya sedikit yaitu 15 buah. Hal ini disebabkan anak usia Wajar Dikdas sudah terserap oleh pendi-

dikan formal yang ada. Artinya, penyelenggaraan Wajar Dikdas di pesantren salafiyah hanya menja-ring anak usia Wajar Dikdas yang belum mengikuti pendidikan formal.

Persentase PPS yang menye-lenggarakan Wajar Dikdas, untuk skala nasional dengan diwakili 6 propinsi ‘gemuk’ pesantren, maka rata-rata persentase 26,03 % dari seluruh jumlah pesantren salaf untuk masing-masing propinsi. Jumlah itu menurun ketika ditarik di tingkat kabupaten. Dari enam kabupaten sasaran penelitian diketahui rata-rata perkabupaten menurun menjadi 17, 38 %

Peserta Program Wajar Dikdas di PPS.

Jumlah terbesar peserta terdapat di Jawa Timur (118977 anak), me-nyusul Kalimantan Selatan (8379

anak), Jawa Tengah (7008 anak), Sumut (2500 anak), Palembang (918 anak), dan jumlah terkecil ada di Yogyakarta (796 anak).

Rasio Program Wajar Dikdas antara Tingkat Ula dan Wustho.

Berbagai daerah sasaran penelitian menunjukkan bahwa program Wajar Dikdas banyak di-lakukan di tingkat Wustho, yaitu di empat kabupaten/kota Palembang, Semarang, Yogyakarta dan Banjar, dengan perbandingan rata-rata tingkat Wustho 100 % dari total PPS penyelenggara Wajar Dikdas, berbanding dengan tingkat Ula yang hanya 25 % (100: 25). Di empat kota ini PPS yang menyelenggarakan program Wajar Dikdas semuanya melaksanakan tingkat Wustho .

Ada dua kabupaten/kota yaitu di Langkat dan Surabaya, di mana jumlah penyelenggara Wajar Dikdas

Tabel: 1

Persentase PPS. Peny. Wajar Dikdas dan Jumlah Peserta di Enam Propinsi

PROPINSI	JML PPS	PPS PENY.	%	JML PESERTA
Sumut	35	25	71.43	2.500
Sum Sel	105	43	40.95	918
Jawa Tengah	1598	167	10.45	7.008
Yogyakarta	202	15	7.43	796
Jawa Timur	1666	676	40.58	11.8977
Kal Sel	113	42	37.17	8.379

Perbandingan Program Wajar Dikdas Wilayah Kab/Kota
Antara Tingkat Ula dengan Tingkat Wustho

KABUPATEN	PPS PENY.	TK ULA		TK WUSTHO		KETERANGAN
		JML	%	JML	%	
Palembang	5	4	80.00	5	100.00	Kebanyakan Tk Wustho
Semarang	14	0	0.00	14	100.00	Kebanyakan Tk Wustho
Sleman	5	1	20.00	5	100.00	Kebanyakan Tk Wustho
Banjar	9	3	33.33	9	100.00	Kebanyakan Tk Wustho
Langkat	7	7	100.00	2	28.57	Tk Ula lebih banyak
Kota Surabaya	18	18	100.00	14	77.78	Tk Ula lebih banyak
Rata-rata (%)			100.00		64.00	

tingkat Ula lebih banyak dibandingkan yang menyelenggarakan tingkat Wustho, dengan perbandingan rata-rata 100 : 64.

Profil PPS Penyelenggara Wajar Dikdas

1. PPS *Az Zuhrob, Langkat Sumatera Utara.*

Pondok Pesantren Salafiyah Az-Zuhroh dipimpin oleh H. Madyan A. Jalil, beralamat di Jl. Pasar Belakang Besilam Babussalam Kec. Pd. Tulang Kab. Langkat. Daerah Besilam sangat terkenal di Sumatera Utara, karena sejak lama terdapat pengajian Tarekat Naqsabandiyah dengan pengikut dari berbagai daerah bahkan dari luar Sumatera Utara.

Visi PPS ini adalah beribadah dan memperoleh ridha Allah dengan mengimplimentasikan fungsi khalifah Allah di muka bumi. Misinya; 1) mempersiapkan individu yang unggul dan berkualitas menuju terbentuknya umat yang terbaik. 2) mempersiapkan kader ulama dan pemimpin umat yang mampu melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar.

Mulai tahun 2002 PPS Az-Zuhroh menyelenggarakan Program Wajar Dikdas 9 tahun untuk tingkat Ula sekaligus Wustho.

2. PPS *Al Husna Kota Palembang, Sumatera Selatan.*

Pondok Pesantren Salafiyah Al Husna didirikan pada tahun 2000

oleh Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al- Husna dengan Nomor Statistik Pesantren: 512 171 03187, beralamat di Jalan K.H. A. Azhari, Lorong Pedatuan Darat Kelurahan 12 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang. Pesantren ini dipimpin oleh K.H. Masduki H.MS dan memiliki santri sebanyak 410 orang dengan tenaga pendidik sebanyak 27 orang.

Pesantren ini telah menerima “Piagam Terdaftar” dari Departemen Agama RI dengan Nomor: 06/2005 sebagai penyelenggara Program Wajar Dikdas 9 tahun.

3. PPS Bustanul Mutaallimin, Kota Semarang Jawa Tengah.

Pondok Pesantren Bustanul Mutaallimin terletak di Dusun Brojodito, Desa Pakis, Kec. Bringin Kabupaten Semarang. Pesantren ini diasuh oleh KH. M. Syaifuddin, seorang kiyai yang juga mantan pegawai Kandepag Kabupaten Semarang. Dalam kegiatan pembinaan pesantren sehari-hari, ia dibantu secara penuh oleh kedua putranya, Syarifah selaku penanggungjawab kegiatan pondok, dan Imam Fakhurrozi, selaku ketua pondok. Secara formal, terdapat sejumlah tokoh masyarakat setempat yang ikut terlibat sebagai

pengurus pondok, termasuk Kepala Desa Pakis, selaku pelindung.

Jumlah santri PP. Bustanul Mutaallimin sebanyak 171 orang, terdiri dari 96 orang santri putra, dan 75 orang santri putri. Ustadz/ustadzah yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari sebanyak 12 orang.

Jumlah peserta Program Wajar Dikdas pada pesantren ini sebanyak 51 orang, dan seluruhnya pada jenjang Wustho. Sedangkan tenaga guru yang dimiliki sebanyak 6 orang, dengan koordinator Sdr. Syarifah (putri pengasuh pondok).

4. PPS Sunan Pandanaran, Sleman D I Yogyakarta.

Pondok Pesantren Sunan Pandanaran didirikan oleh KH. Mufid Mas’ud bersama istrinya Ny. Hj. Jauharoh Munawwir pada tanggal 20 Desember 1975. KH. Mufid Mas’ud dilahirkan di Solo tahun 1928. Pesantren ini beralamat di Dusun Candi, Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun Candi sendiri merupakan tempat yang berada di kaki Gunung Merapi (Jalan Kaliurang km 12,5), maka udara di lingkungan pesantren relatif sejuk. Suasana tersebut sangat membantu

proses belajar, kekhusyu'an beribadah serta menghayati pembentukan pribadi maupun akhlak santri sebagai kader agama yang saleh. Pesantren ini dipimpin langsung oleh K.H. Mufid Mas'ud dan memiliki santri sebanyak 996 orang dengan tenaga pendidik (ustadz/ustadzah) sebanyak 26 orang

Pesantren ini sebenarnya bercorak kombinasi karena selain menyelenggarakan kegiatan pembelajaran salafiyah tetapi juga memiliki sekolah formal seperti MTs dan MA. Wajar Dikdas di pesantren ini cenderung menjaring siswa yang tidak terserap pendidikan formal, dan umumnya berasal dari luar daerah. Jumlah peserta Wajar Dikdas sebanyak 36 anak. Perkembangan peserta dari tahun ke tahun semakin menurun.

5. *PPS Al Fitrab, Surabaya Jawa Timur*

Pondok pesantren ini didirikan oleh KH. Achmad Asrori Al Ishaqy. Pesantren berlokasi di jalan Kedinding Lor No. 99 Surabaya dan menempati areal tanah seluas 3 hektar. Visi dan misi pesantren adalah menanamkan akhlakul karimah dan budi pekerti yang mulia sejak dini sebagai bekal hidup dan kehidupan putra-putri dalam melanjutkan per-

juangan *salafussholeh* untuk melestarikan dan mengembangkan suri tauladan, bimbingan, dan tuntunan perjuangan Nabi SAW.

Pengelola program Wajar Dikdas adalah pimpinan pesantren yaitu Drs. H. Ainul Huri, sedangkan penanggungjawabnya adalah Sahrudin, S.Pd. Sekretaris dipegang oleh Moh. Sollehan, dan bendahara Ega A. Khomsa. Bagian kurikulum dan bagian Litbang diserahkan pada Alwi, ST dan Dzulfikar, ST.

Santri yang belajar di pesantren ini cukup banyak jumlahnya, yaitu 703 orang, terdiri dari 528 santri laki-laki dan 175 santri perempuan. Santri-santri tersebut berusia 8 hingga 25 tahun. Pondok pesantren Assalafi Al Fithrah merupakan salah satu pesantren salafiyah yang ikut dalam program Wajar Dikdas dan memiliki siswa paling banyak di Kota Surabaya, yaitu sebanyak 421 peserta.

6. *PPS Al Mursyidul Amin, Banjar Kalimantan Selatan.*

Pondok Pesantren Salafiyah Al Mursyidul Amin didirikan pada tahun 2000 oleh KH. Ahmad Bakeri. Pesantren ini merupakan pesantren salaf terbesar ketiga di Propinsi Kalimantan Selatan. Program Wajar Dikdas di daerah ini mendapat

sambutan yang sangat baik. Untuk satu pesantren ini saja jumlah peserta Wajar Dikdas sebanyak 660 anak. Para penyelenggara Wajar Dikdas di pesantren salafiyah di daerah ini umumnya menginginkan agar program penyelenggaraan Wajar Dikdas ini bisa diteruskan sebagai pelengkap dari kegiatan pesantren sekaligus kesempatan santri untuk memperoleh materi pendidikan formal.

Analisa Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada Enam PPS

1. Penyelenggaraan

Program Wajar Dikdas semakin diminati di pesantren-pesantren salafiyah. Hal itu terjadi pada daerah-daerah yang banyak pesantren model salaf seperti di Kab. Banjar yang pada tahun 2004 hanya ada 5 PPS penyelenggara Wajar Dikdas, sementara saat penelitian ini dilakukan tahun 2005 jumlahnya bertambah menjadi 9 buah. Hal ini menunjukkan bahwa program Wajar Dikdas mulai dipercaya menjadi upaya strategis santri salafiyah yang selama ini tidak memiliki ijazah formal dimana mereka dapat melanjutkan belajar, mencari pekerjaan atau berpartisipasi dalam urusan politik, semisal pilihan Kepala Desa.

Sebagian PPS penyelenggara Wajar Dikdas bahkan berharap lebih jauh, hendaknya program ini tidak hanya program sesaat, tetapi hendaknya bisa dijadikan model pembelajaran yang berkelanjutan. Permintaan ini menarik dan dapat dipertimbangkan mengingat model pembelajaran seperti ini bisa memperkaya diversifikasi pendidikan dari bentuk pendidikan yang telah ada selama ini, sekaligus berpeluang mendongkrak aktualisasi potensi keilmuan di pesantren salaf.

2. Siswa

Sekalipun Wajar Dikdas semula bertujuan untuk program penuntasan, yaitu menjaring anak-anak usia pendidikan dasar yang tidak terakomodasi pada sekolah formal, namun pada daerah-daerah tertentu ternyata jumlah peserta Wajar Dikdas ini berimbang dengan sekolah formal seperti pada kasus PPS Al Mursyidul Amin di Banjar Kalsel dan PPS Al Fitrah, Surabaya. PPS Al Mursyidul Amin mempunyai peserta program Wajar Dikdas sebanyak 660 anak, sedangkan PPS Al Fitrah mempunyai peserta sebanyak 421 anak.

Dari ke enam propinsi sasaran penelitian, diketahui bahwa siswa terbanyak ditemukan di Propinsi

Jawa Timur dengan total jumlah siswa sebanyak 118.977 anak, disusul Propinsi Kalimantan Selatan sebanyak 8379 anak, dan selanjutnya Propinsi Jawa Tengah dengan siswa sebanyak 7008 anak, Propinsi Sumatera Utara (2500 anak), Propinsi Sumatera Selatan (918 anak), dan terendah ada di Yogyakarta yaitu 796 anak.

Pada daerah-daerah yang sudah maju dan merata keberadaan pendidikan formalnya seperti di Yogyakarta dan Palembang, jumlah siswa Wajar Dikdas cenderung sedikit. Di Yogyakarta pada PPS Pandanaran, peserta Wajar Dikdas hanya 36 orang, sedangkan di Palembang sebanyak 28 orang.

Deskripsi siswa per PPS penyelenggara Wajar Dikdas pada enam propinsi adalah sebagai berikut; pada PPS Az Zuhroh, Langkat, Sumatera Utara (61 anak), PPS Al Husna, Kota Palembang, Sumatera Selatan (28 anak), PPS Bustanul Mutaallimin, Kota Semarang Jawa Tengah (117 anak), PPS Sunan Pandanaran, Sleman D I Yogyakarta (36 anak), PPS Al Fitrah, Surabaya Jawa Timur (421 anak), PPS Al-Mursyidul Amin, Banjar Kalimantan Selatan (660 anak).

3. Guru

Perekrutan tenaga guru pada program Wajar Dikdas di kebanyakan PPS tidak ada kesulitan, mengingat sekarang banyak sarjana di pedesaan atau di sekitar pesantren yang belum memperoleh pekerjaan tetap. Masalahnya adalah bagaimana memberi gaji atau honor pada mereka. Hal ini yang nampaknya menjadi satu masalah di lapangan.

Latar belakang pendidikan guru dari keenam PPS pelaksana Wajar Dikdas dengan total jumlah guru sebanyak 87 guru, diketahui paling besar didominasi oleh lulusan SLTA/MA yakni sebanyak 40,29 %, disusul sarjana (S1) sebanyak 36,78 % , lulus D2/D3 sebanyak 9 orang (10,34 %), dan lulusan pesantren sebanyak 11 orang (12,64 %). Banyaknya lulusan SLTA/MA ini lebih disebabkan karena para pengelola pesantren salaf biasanya hanya meluluskan pendidikan formalnya di tingkat sekolah menengah atas tersebut. Adapun lulusan S1 menduduki urutan kedua karena mereka kebanyakan adalah tenaga luar pesantren yang diminta untuk membantu pelaksanaan Wajar Dikdas oleh pihak pesantren.

Deskripsi jumlah guru Wajar Dikdas PPS pada keenam sasaran

adalah sebagai berikut; Az Zuhroh, Langkat, Sumatera Utara (6 guru), PPS Al Husna, Kota Palembang, Sumatera Selatan (27 guru), PPS Bustanul Mutaallimin, Kota Semarang Jawa Tengah (6 guru), PPS Sunan Pandanaran, Sleman DIY (7 guru), PPS Al Fitrah, Surabaya Jawa Timur (20 guru), PPS Al Mursyidul Amin, Banjar Kalimantan Selatan (10 guru)

4. Sarana Prasarana

Kebanyakan pesantren salafiyah yang menyelenggarakan program Wajar Dikdas menggunakan sarana prasarana kelas dengan memanfaatkan potensi ruang kelas yang telah ada pada pesantren tersebut. Meskipun demikian, ada pesantren yang mempunyai gedung sendiri untuk pelaksanaan program Wajar Dikdas yaitu Pesantren Bustanul Muta'alimin, Semarang dan PPS Al Fitrah, Surabaya. Ada juga yang memiliki laboratorium bahasa sendiri, yaitu di PPS Al Mursyidul Amin, Banjar. Pembangunannya dibiayai oleh bupati dengan biaya APBD setempat.

Sarana prasarana buku nampaknya masih bermasalah. Kebanyakan PPS penyelenggara Wajar Dikdas mengalami kekurangan buku. Hanya ada 1 PPS yang jumlah bu-

kunya melebihi jumlah peserta, yaitu pada PPS Pandanaran, Sleman, Yogyakarta.

5. Pembiayaan

Pembiayaan program Wajar Dikdas umumnya dibantu oleh Departemen Agama di daerah masing-masing. Ada yang setiap tahun dibantu 3 juta (Kal Sel), ada bantuan untuk tahun pertama saja (Yogyakarta), ada bantuan dalam jumlah besar sehingga memungkinkan pembangunan gedung ruang belajar (Bustanul Mutaalimin, Semarang dan Al Fitrah, Surabaya). Di samping itu ada yang pihak penyelenggara meminta SPP dari siswa (PPS Al Mursyidul Amin), di mana di kebanyakan PPS lain peserta dibebaskan.

Kebutuhan dan Ketersediaan Bahan Ajar

1. Penyediaan dan Distribusi

Berdasarkan informasi Departemen Agama, buku-buku program Wajar Dikdas di pesantren salafiyah yang digandakan Departemen Agama adalah buku-buku untuk kegiatan tatap muka, yaitu buku Matematika, Bahasa Indonesia dan IPA. Namun begitu, jumlah buku yang diterbitkan itu belum memenuhi kebutuhan semua peserta Wajar.

Pesantren salafiyah sasaran survai ini jumlah peserta Wajar Dikdasnya adalah sebanyak 1323 anak. Jika setiap siswa idealnya masing-masing memegang 1 buku untuk materi tatap muka, maka buku-buku (Matematika, Bahasa Indonesia, IPA) yang dibutuhkan sebanyak $3 \times 1323 = 3969$ buku. Namun dari jumlah itu, untuk ketiga mata pelajaran secara rata-rata hanya terpenuhi 32,75 %

Distribusi buku dari Departemen Agama berlangsung secara: *pertama*, melalui Kandepag, yaitu buku diberikan langsung ke Kandepag. Namun cara ini banyak dikeluhkan oleh Kandepag, karena tidak ada biaya distribusi buku-buku tersebut ke masing-masing PPS penyelenggara program Wajar Dikdas. *Kedua*, dikirimkan langsung ke PPS penyelenggara Wajar Dikdas. Cara ini dipandang efektif karena buku langsung diterima oleh lembaga yang bersangkutan. Namun cara ini juga ada kelemahan, karena banyak buku yang sampai ke PPS penyelenggara Wajar Dikdas tidak diketahui jumlah dan jenis buku yang dikirimkan.

2. *Ketersediaan Bahan Ajar Materi Tatap Muka*

Untuk buku materi tatap muka, ditemukan jumlah terendah ada

di Bustanul Mutaalimin Semarang yang hanya terpenuhi 5,13 % dari jumlah peserta. Sedangkan dari tingkat keterpenuhan tertinggi terjadi di PPS Sunan Pandanaran, Sleman yaitu 55,56 % dari peserta. Untuk enam PPS penyelenggara Wajar Dikdas secara rata-rata terpenuhi 32,75 %.

1) *Bahan Ajar Matematika*

Dari keenam pesantren di enam propinsi tersebut, dari kebutuhan 1323 anak, bahan ajar matematika yang ada di PPS penyelenggara hanya tersedia 520 buku atau terpenuhi 39,30 % saja, dari jumlah peserta sebanyak 1323 anak. Jumlah paling sedikit diterima Bustanul Mutaalimin, Semarang yang hanya menerima 6 buah untuk peserta Wajar Dikdas sebanyak 117 anak (terpenuhi hanya 5,13 %). Jumlah buku terbanyak diterima di PPS Al Fitrah, Surabaya, yaitu sebanyak 300 buah (71.26 %).

2) *Bahan Ajar Bahasa Indonesia*

Kebutuhan 1323 anak terhadap bahan ajar Bahasa Indonesia, hanya tersedia 516 buku atau terpenuhi 39,00 % saja. Jumlah paling sedikit diterima Bustanul Mutaalimin, Semarang yang hanya menerima 6 buah untuk peserta

Wajar Dikdas sebanyak 117 anak (terpenuhi hanya 5,13 %). Jumlah buku terbanyak diterima di PPS Al Fitrah, Surabaya, yaitu sebanyak 300 buah (71.26 %).

3) Bahan Ajar IPA

Kebutuhan 1323 anak terhadap bahan ajar IPA yang ada di PPS penyelenggara hanya tersedia 268 buku atau terpenuhi 20,26 % saja. Jumlah paling sedikit diterima Bustanul Mutaalimin, Semarang yang hanya menerima 6 buah untuk peserta Wajar Dikdas sebanyak 117 anak (terpenuhi hanya 5,13 %). Jumlah buku terbanyak diterima sama sebanyak 100 buku pada di PPS Al Fitrah, Surabaya (memenuhi 23,75 %) dan PPS Al Mursyidul Amin, Banjar (15,15 %).

Materi/modul mandiri

Untuk buku tatap muka, pengadaannya dilakukan sendiri atau bantuan dari lembaga lain. Materi/modul mandiri untuk 8 pelajaran

(IPS, PPKN, Ekonomi, Sejarah, Geografi, Fisika, Biologi, Bahasa Inggris) dengan jumlah peserta Wajar Dikdas sebanyak 1323 anak di enam PPS sasaran penelitian hanya tersedia rata-rata 10,25

Rinciannya, IPS tersedia 228 buku (17,23 %), PPKN tersedia 228 buku (17,23 %), Ekonomi tersedia 138 buku (10,43 %), Sejarah tersedia 43 buku (3,25 %), Geografi tersedia 132 buku (9,98 %), Fisika tersedia 95 buku (7,18 %), Biologi tersedia 105 buku (7,18 %) dan Bahasa Inggris tersedia 116 buku (8,77 %).

1) Bahan Ajar IPS

Dari keenam pesantren di enam propinsi tersebut, dari kebutuhan 1323 anak, bahan ajar IPS yang ada di PPS penyelenggara hanya tersedia 228 buku atau terpenuhi 17,23 % saja. Jumlah paling sedikit terjadi pada PPS Bustanul Mutaalimin, Semarang yang hanya memiliki 3 buah untuk peserta Wa-

Tabel 3: Keterpenuhan Bahan Ajar untuk Materi Tatap Muka (Matematika, Bahasa Indonesia, IPA)

NO	BUKU PELAJARAN	TERPENUHI (%)	KURANG (%)
1	Matematika	39,30	60,70
2	Bahasa Indonesia	39,00	61,00
3	IPA	20,26	79,74

jar Dikdas sebanyak 117 anak (terpenuhi hanya 2,56 %). Jumlah buku terbanyak diterima sama sebanyak 100 buku pada di PPS Al Fitrah, Surabaya (memenuhi 23,75 %) dan PPS Al Mursyidul Amin, Banjar (memenuhi 15,15 %).

2) *Bahan Ajar PPKN*

Sama kasusnya dengan pelajaran IPS, kebutuhan terhadap bahan ajar PPKN yang ada di PPS penyelenggara hanya tersedia 228 buku atau terpenuhi 17,23 % saja. Jumlah paling sedikit terjadi pada PPS Bustanul Mutaalimin, Semarang yang hanya memiliki 3 buah untuk peserta Wajar Dikdas sebanyak 117 anak (terpenuhi hanya 2,56 %). Jumlah buku terbanyak diterima PPS Al Fitrah, Surabaya (memenuhi 23,75 %) dan PPS Al Mursyidul Amin, Banjar (memenuhi 15,15 %).

3) *Bahan Ajar Ekonomi*

Kebutuhan terhadap bahan ajar Ekonomi yang ada di PPS penyelenggara hanya tersedia 138 buku atau terpenuhi 10,43 % saja. Ada dua PPS penyelenggara program yang tidak mempunyai buku dalam pelajaran ini, yaitu di PPS Az Zuhroh, Langkat dan PPS Al

Husna, Palembang. Jumlah buku terbanyak dimiliki oleh PPS Al Fitrah, Surabaya yang memiliki 100 buku ekonomi (23,75 %).

4) *Bahan Ajar Sejarah*

Dari keenam pesantren di enam propinsi tersebut, dari kebutuhan 1323 anak, bahan ajar Sejarah yang ada di PPS penyelenggara hanya tersedia 43 buku atau terpenuhi 3,25 % saja. Ada satu PPS penyelenggara program yang tidak mempunyai buku dalam pelajaran ini yaitu di PPS Az Zuhroh, Langkat. Jumlah buku terbanyak dimiliki PPS terjadi pada PPS Al Mursyidul Amin, Banjar sebanyak 25 buku (terpenuhi 3,75 %).

5) *Bahan Ajar Geografi*

Kebutuhan terhadap bahan ajar Geografi yang ada di PPS penyelenggara hanya tersedia 132 buku atau terpenuhi 9,98 % saja. Ada satu PPS penyelenggara program yang tidak mempunyai buku dalam pelajaran ini yaitu di PPS Az Zuhroh, Langkat. Jumlah buku terbanyak dimiliki PPS terjadi pada PPS Al Fitrah, Surabaya yang memiliki 90 buku (terpenuhi 21,38 %).

6) *Bahan Fisika*

Kebutuhan terhadap bahan ajar Fisika yang ada di PPS penyeleng-

gara hanya tersedia 95 buku atau terpenuhi 7,18 % saja. Ada satu PPS penyelenggara program yang tidak mempunyai buku dalam pelajaran ini, yaitu di PPS Az Zuhroh, Langkat. Jumlah buku terbanyak dimiliki PPS terjadi pada PPS Al Fitrah, Surabaya yang memiliki 65 buku (15,44 %).

7) *Bahan Ajar Biologi*

Dari keenam pesantren di enam propinsi tersebut, dari kebutuhan 1323 anak, bahan ajar Biologi yang ada di PPS penyelenggara hanya tersedia 105 buku atau terpenuhi 7,94 % saja.

Ada satu PPS penyelenggara program yang tidak mempunyai buku dalam pelajaran ini yaitu di

PPS Az Zuhroh, Langkat. Jumlah buku terbanyak dimiliki PPS terjadi pada PPS Al Fitrah, Surabaya yang memiliki 75 buku (terpenuhi 17,81 %).

8) *Bahan Ajar Bahasa Inggris*

Kebutuhan terhadap bahan ajar Bahasa Inggris yang ada di PPS penyelenggara hanya tersedia 116 buku atau terpenuhi 8,77 % saja. Ada dua PPS penyelenggara program yang tidak mempunyai buku dalam pelajaran ini, yaitu di PPS Az Zuhroh, Langkat dan PPS Al Fitrah, Surabaya. Jumlah buku terbanyak dimiliki PPS Al Mursyidul Amin, Banjar yang memiliki 100 buku (15,15 %).

TABEL 4
Keterpenuhan Bahan Ajar untuk Modul Mandiri
di Enam Propinsi

NO	BUKU PELAJARAN	TERPENUHI (%)	KURANG (%)
1	IPS	17,23	82,73
2	PPKN	17,23	82,73
3	Ekonomi	10,43	89,57
4	Sejarah	3,25	96,75
5	Geografi	9,98	90,02
6	Fisika	7,18	92,82
7	Biologi	7,94	92,06
8	Bahasa Inggris	8,77	91,23

Keberhasilan Ujian Akhir Nasional

Dari 6 PPS penyelenggara program Wajar Dikdas pada tahun 2004, dua diantaranya, yaitu PPS Az Zuhroh Langkat dan PPS Al Husna Palembang, belum pernah menyelenggarakan Ujian Akhir nasional (UAN) dan karenanya belum meluluskan siswa.

PPS di Pulau Jawa dan Kalimantan semuanya telah mengikuti UAN dengan tingkat kelulusan (tahun 2004): PPS Bustanul Mutaallimin, Kota Semarang Jawa Tengah, dari 30 peserta ujian, lulus semuanya atau 100 %; PPS Sunan Pandanaran, Sleman D I Yogyakarta, dari 20 peserta ujian, lulus 18 anak atau 90 %; PPS Al Fitrah, Surabaya Jawa Timur, dari 50 peserta ujian, lulus 17 anak atau 34,00 %; PPS Al Mursyidul Amin, Banjar Kalimantan Selatan, dari 338 peserta ujian, lulus 154 anak atau 45,56 %.

Jumlah total peserta ujian di 4 PPS yang melaksanakan Wajar Dikdas (Bustanul Mutaalimin, Semarang, Pandanaran, Sleman, Al Fitrah Surabaya dan Al Mursyidul Amin, Banjar) yang berjumlah 438 peserta ujian, lulus 219 anak atau lulus secara rata-rata 50 %.

Beberapa Temuan:

1. Pesantren salafiyah penyelenggara Wajar Dikdas menghendaki agar model penyetaran seperti penuntasan Wajar Dikdas diteruskan atau tidak diberhentikan di tengah jalan, bahkan bisa dijadikan salah satu model diversifikasi pendidikan.
2. Departemen Agama pada tahun 2006 telah menganggarkan kegiatan penyediaan bahan ajar untuk peserta Wajar Dikdas, dan itu rencananya akan diserahkan ke daerah. Namun, dari usulan DIPA tahun 2006 tidak ada satu pun daerah yang mengusulkan anggaran untuk kegiatan ini.
3. Ditemukan PPS yang menerima bantuan buku-buku dari Departemen Agama, namun tidak dipergunakan karena buku tersebut dianggap terlalu tebal, dan waktu untuk mengajarkannya tidak ada. Kasus ini terjadi pada PPS Pandanaran, Sleman Yogyakarta. Sebagai jalan keluar, PPS tersebut menyusun modul sendiri dengan tetap memperhatikan materi dan tujuan pembelajaran bahan ajar dimaksud.

PENUTUP

Kesimpulan

Program Wajar Dikdas semakin diminati di pesantren-pesantren salafiyah. Program ini menjadi jalan keluar yang strategis bagi para santri salafiyah yang selama ini tidak memiliki ijazah formal untuk melanjutkan studi, mencari kerja bahkan berpartisipasi di dunia politik.

Penyediaan dan distribusi bahan belajar Wajar Dikdas di pesantren salafiyah selama ini telah diusahakan oleh Departemen Agama, namun sejauh ini yang digandakan hanya buku-buku untuk kegiatan tatap muka, yaitu buku Matematika, Bahasa Indonesia dan IPA. Itupun dalam jumlah yang masih kurang dari kebutuhan. Sedangkan untuk modul pelajaran non tatap muka (mandiri) beberapa PPS di daerah mengusahakan sendiri dan sebagian mendapat kiriman bantuan dari Diknas.

Distribusi buku dilakukan melalui Kandepag namun cara ini dikeluhkan karena tidak ada biaya distribusi buku-buku tersebut ke masing-masing PPS. Kedua, dikirimkan langsung ke PPS penyelenggara dan cara ini dipandang efektif karena buku langsung diterima oleh lembaga yang bersangkutan. Kelemahannya, banyak buku

yang sampai ke PPS tidak diketahui jumlah dan jenis buku yang dikirimkan.

Ketersediaan bahan belajar hanya terpenuhi rata-rata 32,75 %. Khusus untuk buku tatap muka tersedia rata-rata 10,25 untuk 8 pelajaran (IPS, PPKN, Ekonomi, Sejarah, Geografi, Fisika, Biologi, Bahasa Inggris).

Pemanfaatan bahan ajar bervariasi. Ada PPS yang menggunakannya secara utuh, ada yang menyusun ulang buku atau modul dengan kreasi sendiri. Ada juga yang tidak memakainya karena dianggap terlalu tebal dan menggantinya dengan buku lain.

Kendala di lapangan yang paling dirasakan adalah keterbatasan buku pelajaran yang menyebabkan kesulitan tersendiri dalam memacu belajar siswa sehingga jam belajar dihabiskan untuk menyalin teks buku ke dalam tulisan tangan. Upaya-upaya telah ditempuh misalnya pihak penyelenggara menyediakannya minimal untuk guru.

Untuk masalah guru, permasalahan yang paling urgen dirasakan adalah tidak adanya honor guru. Langkah yang diusahakan PPS penyelenggara adalah memberi honor sekeadarnya, yang tentu saja masih jauh dari kebutuhan minimal

setiap bulan. Hanya karena semangat pesantren salaf yang ikhlas beramal, sehingga program Wajar Dikdas dapat terus berjalan di Pesantren Salafiyah.

Rekomendasi

Melihat animo PPS terhadap program Wajar Dikdas semakin meningkat, maka penelitian ini merekomendasikan hal-hal berikut:

- 1) Kebutuhan buku-buku tatap muka hendaknya dapat dipenuhi sesuai dengan banyaknya jumlah peserta program Wajar Dikdas;
- 2) Modul-modul non tatap muka yang lain, hendaknya bisa ditingkatkan baik dari segi jumlah maupun mutu;
- 3) Untuk penyediaan dan pengandaan bahan ajar, kebijakan Departemen Agama memberikan kewenangan kepada unit kerja di daerah perlu diteruskan;
- 4) Demi kelangsungan program Wajar Dikdas, permasalahan kesejahteraan guru hendaknya dibantu sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Untuk menghindari kesan bahwa program Wajar Dikdas hanya sebagai sarana pemberian ijazah cuma-cuma; maka perlu dibuat standar kelulusan.

SUMBER BACAAN

- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Statistik Pendidikan Agama dan Keagamaan Tahun Ajaran 2005-2006*.
- Fajar, A. Malik (2005): *Holistika Pemikiran Pendidikan*. (Ed) Ahmad Barezi. Jakarta, PT RajaGrafindo.
- Malo, Manase (2002): *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta, Universitas Terbuka.
- Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2003).
- Nasution (1999): *Teknologi Pendidikan*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Tilaar, HAR (2004): *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung, Rosdakarya.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia_Indonesia (dikutip 16/7/2007)